



Laporan Keuangan

BALAI KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON

2023



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai KIPM Ambon adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai KIPM Ambon mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai KIPM Ambon. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Ambon, 06 Mei 2024
Kepala,

Muhammad Hatta Arisasndi, S.St.Pi.,M.Si
NIP 19800527 200312 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	1
III. Laporan Operasional	1
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	2
V. Catatan atas Laporan Keuangan	2
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	22
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	27
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	30
F. Pengungkapan Penting Lainnya	32



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON
JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA WAIHERU - AMBON 97232
TELEPON : (0911) 3869137 : FAKSIMILE : (0911) 361991
LAMAM: www.bkipm.kkp.go.id : POS ELEKTRONIK : ambon@bkipm.kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai KIPM Ambon yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Ambon, 06 Mei 2024
Kepala,

Muhammad Hatta Arisandi, S.St.Pi.,M.Si
NIP 19800527/200312 1 001

Laporan Keuangan Balai KIPM Ambon Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.176.795.500 atau mencapai 110,5 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 160.000.000.

Realisasi Belanja Negara (neto) Tahun 2023 adalah sebesar Rp 9.073.857.797 atau mencapai 99.58 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.9.112.024.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 19.663.360.179 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.21.787.960; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.19.641.572.219; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0. Nilai Kewajiban Rp.24.034.345 dan Ekuitas Rp.19.639.325.834.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 138.935.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.9.054.383.667 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (8.915.448.667). Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.37.860.500 dan sebesar

Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (8.887.588.167).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp.19.605.462.931 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (8.877.588.167) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.8.248.773, koreksi nilai aset non revaluasi Rp.8.248.733, nilai lain-lain Rp.0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 8.903.202.297 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp.19.639.325.834.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI KIPM AMBON
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	160,000,000	176,795,500	110.50	160,820,639
JUMLAH PENDAPATAN		160,000,000	176,795,500	110.50	160,820,639
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	4,378,106,000	4,366,179,387	99.73	4,247,963,102
Belanja Barang	B.4	4,131,018,000	4,104,992,010	99.37	3,174,305,218
Belanja Modal	B.5	602,900,000	602,686,400	99.96	1,276,082,337
JUMLAH BELANJA		9,112,024,000	9,073,857,797	99.58	8,698,350,657

II. NERACA

**BALAI KIPM AMBON
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(DalamRupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Belanja dibayar dimuka	C.1	-	-
Piutang bukan pajak	C.2	-	-
Penyisihan piutang tidak tertagih-piutang bukan pajak	C.3	-	-
Piutang bukan pajak (Netto)	C.4	-	-
Persediaan	C.5	21,787,960	41,286,449
Jumlah Aset Lancar		21,787,960	41,286,449
ASET TETAP			
Tanah	C.3	3,018,281,000	2,953,581,000
Peralatan dan Mesin	C.4	10,202,707,685	10,018,757,685
Gedung dan Bangunan	C.5	18,648,264,355	18,320,820,955
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.6	106,307,000	79,714,000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.7	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.8	(12,333,987,821)	(11,787,163,638)
Jumlah Aset Tetap		19,641,572,219	19,585,710,002
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C.9	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.10	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		19,663,360,179	19,626,996,451
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	24,034,345	21,533,520
Hibah yang belum disahkan	C.12	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		24,034,345	21,533,520
JUMLAH KEWAJIBAN		24,034,345	21,533,520
EKUITAS			
Ekuitas	C.13	19,639,325,834	19,605,462,931
JUMLAH EKUITAS		19,639,325,834	19,605,462,931
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		19,663,360,179	19,626,996,451

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI KIPM AMBON
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	138,935,000	140,641,400
JUMLAH PENDAPATAN		138,935,000	140,641,400
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	4,366,179,387	4,247,963,102
Beban Persediaan	D.3	407,527,539	249,509,087
Beban Barang dan Jasa	D.4	2,011,568,556	1,862,948,963
Beban Pemeliharaan	D.5	842,482,084	477,349,257
Beban Perjalanan Dinas	D.6	903,665,645	603,531,131
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	522,960,456	1,060,243,477
Penyisihan piutang tidak tertagih	D.8	-	-
JUMLAH BEBAN		9,054,383,667	8,501,545,017
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(8,915,448,667)	(8,360,903,617)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Aset Non Lancar	D.8	37,860,500	5,090,000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	1,221,382,337
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		37,860,500	(1,216,292,337)
Pendapatan Penyelesaian Kwajiban Jangka Panjang		-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	4,223,629
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Jumlah surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	4,223,629
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		37,860,500	(1,212,068,708)
Pos Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		(8,877,588,167)	-
POS LUAR BIASA	D.9		
SURPLUS/DEFISIT LO		(8,877,588,167)	(9,572,972,325)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI KIPM AMBON
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	19,605,462,931	19,418,470,323
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(8,877,588,167)	(9,572,972,325)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	8,248,773	1,221,436,665
PENYESUAIAN NILAI ASET		-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.4	8,248,773	1,221,382,337
LAIN-LAIN		-	54,328
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	8,903,202,297	8,538,528,268
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6	33,862,903	168,992,608
EKUITAS AKHIR		19,639,325,834	19,605,462,931

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai KIPM Ambon

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Balai KIPM Ambon merupakan pemegang otoritas kompeten di Sangihe dalam mendeteksi dan melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya HPI/HPIK, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta penerapan system manajemen mutu berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Berkedudukan di Kompleks Pelabuhan Laut Tahuna, Balai KIPM Ambon mempunyai tugas “Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dari resiko yang dapat timbul akibat masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan berbahaya serta sebagai instrument teknis untuk meningkatkan daya saing produk perikanan melalui sertifikasi kesehatan ikan”. Dalam melaksanakan tugasnya Balai KIPM Ambon menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- Melakukan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- Melaksanakan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK;
- Melaksanakan pemantauan HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- Melaksanakan inspeksi terhadap Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- Melakukan surveilen HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- Melakukan pengujian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- Menerapkan system manajemen mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional;
- Pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK;
- Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi diatas Balai KIPM Ambon berkomitmen dengan visi “ *Mewujudkan hasil perikanan yang sehat, bermutu, aman konsumsi dan terpercaya.*”

- Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Balai KIPM Ambon adalah “ *Mewujudkan pencegahan penyebaran HPIK serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang mampu menjamin lalu lintas hasil perikanan yang sehat, bermutu, aman konsumsi dan terpercaya*”

Pendekatan A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

**Penyusunan
Laporan
Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai KIPM Ambon. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis A.3. Basis Akuntansi

Akuntansi

Balai KIPM Ambon menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai KIPM Ambon dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai KIPM Ambon. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai KIPM Ambon adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA* (1) **Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- (2) Pendapatan- LO

LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan **c. Penyusutan Aset Tetap**
Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan

setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa anfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa

manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi (8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
PertamaKali*

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

bkipm ambon

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Balai KIPM Ambon* belum mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal tetapi telah mengadakan revisi POK. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	160,000,000	160,000,000
Jumlah Pendapatan	160,000,000	160,000,000
Belanja		
Belanja Pegawai	4,246,308,000	4,378,106,000
Belanja Barang	4,131,018,000	4,131,018,000
Belanja Modal	602,900,000	602,900,000
Jumlah Belanja	8,980,226,000	9,112,024,000

Realisasi
Penda
patan
Rp.17
60.79
5.500

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.176.795.500, Pendapatan Balai KIPM Ambon terdiri dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.37.860.500, Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya sebesar Rp.135.835.000, Pendapatan Jasa Karantina Perikanan sebesar Rp.3.100.000. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	(dalam rupiah)		
	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Nilai kenaikan/ (penurunan)
Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan	0	255,058	(255,058)
Pendapatan dari penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2,090,000	(2,090,000)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	3,517,702	(3,517,702)
Pendapatan dan penjualan peralatan dan mesin	37,860,500	3,000,000	34,860,500
Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi lainnya	135,835,000	135,130,000	705,000
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	0	10,610,552	(10,610,552)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	705,927	(705,927)
Pendapatan jasa karantina	3,100,000	5,511,400	(2,411,400)
Jumlah Pendapatan dan Hibah	176,795,500	160,820,639	15,974,861

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pendapatan fungsional Balai KIPM Ambon Tahun 2023 sebesar Rp.176.795.500- atau 104,5 persen dari estimasi pendapatan 2023 yang telah ditetapkan sebesar Rp.160.000.000,- dimana sebagian besar merupakan pendapatan jasa karantina perikanan (425332) yaitu sebesar Rp.3.100.000,- dan Pendapatan pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya (425289) sebesar Rp.135.835.000,-

Realisasi B.2 Belanja

Belanja

Negara

Rp.9.073.

857.797,-

Laporan realisasi belanja bruto Balai KIPM Ambon tahun 2023 berdasarkan jenis belanja adalah sebesar **Rp.9.073.857.811,-** yang terdiri dari belanja pegawai sebesar **Rp.4.366.179.387,-**, belanja barang sebesar **Rp.4.104.992.010,-**, dan belanja modal sebesar **Rp.602.686.400.**

Total penurunan realisasi bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar **Rp.8.698.350.657,-** yang terdiri atas kenaikan pada belanja pegawai sebesar

Rp.118.216.285,- kenaikan pada belanja barang sebesar **Rp.929.326.010-** dan pada belanja modal penurunan sebesar **Rp.673.395.937,-**. Rincian anggaran dan realisasi belanja tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	4,366,179,387	4,247,963,102	2.78
Belanja Barang	4,104,992,010	3,174,305,218	29.32
Belanja Modal	602,686,400	1,276,082,337	(52.77)
Jumlah	9,073,857,797	8,698,350,657	4.32

Belanja B.3 Belanja Pegawai

Pegawai
Rp.4.366.
179.387,-

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2023 adalah sebesar Rp.4.366.179.387,-. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di TA.2022 maka terdapat kenaikan sebesar Rp.118.216.285,-. mengingat realisasi belanja pegawai pada TA 2022 sebesar Rp.4.247.963.102,-. kenaikan belanja pegawai pada TA.2023 disebabkan oleh adanya penambahan biaya lembur Pegawai pada Balai KIPM Ambon.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI DESEMBER 2023	REALISASI DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1,920,366,890	1,983,835,592	
Belanja Gaji pokok PNS	1,324,968,160	1,366,120,700	(3.01)
Pembulatan gaji PNS	19,496	22,455	(13.18)
Tunjangan suami/istri PNS	97,420,270	90,426,500	7.73
Tunjangan anak PNS	33,105,906	32,341,182	2.36
Tunjangan struktural PNS	38,160,000	27,900,000	36.77
Tunjangan fungsional PNS	89,835,000	98,630,000	(8.92)
Tunjangan PPh PNS	2,064,838	1,835,375	12.50
Tunjangan beras PNS	86,252,220	86,107,380	0.17
Tunjangan uang makan PNS	235,846,000	259,487,000	(9.11)
Tunjangan umum PNS	12,695,000	20,965,000	(39.45)
Belanja lembur	556,842,000	399,966,000	39.22
- Belanja uang makan lembur	556,842,000	399,966,000	39.22
Belanja Tunjangan Khusus	1,888,970,511	1,864,701,563	1.30
-Belanja pegawai (Tunjangan Khusus)	1,888,970,511	1,864,701,563	1.30
Jumlah Belanja	4,366,179,401	4,248,503,155	2.77

Belanja B.4 Belanja Barang

Barang
Rp.4.10
4992.01
0,-

Realisasi Belanja Barang tahun 2023 adalah sebesar Rp.4.104.992.010,-. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja barang pada tahun lalu, maka terjadi kenaikan sebesar Rp.930.686.792,- mengingat realisasi tahun lalu sebesar Rp.3.174.305.218,-.

Kenaikan alokasi belanja barang ini salah satunya disebabkan karena adanya penambahan anggaran pada belanja barang.

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1,166,787,386	995,950,353	17.15
- Belanja keperluan perkantoran	911,445,340	704,271,900	29.42
- Belanja penambah daya tahan tubuh	30,800,000	37,199,300	(17.20)
- Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	7,198,783	2,901,870	148.07
- Belanja honor operasional satuan kerja	138,528,000	159,602,000	(13.20)
- Belanja operasional lainnya	78,815,263	85,975,283	(8.33)
- Belanja operasional penanganan covid-19		6,000,000	(100.00)
Belanja Barang Non Operasional	424,298,500	196,813,500	115.58
- Belanja bahan	382,135,000	190,502,500	100.59
- Belanja honor output kegiatan	8,160,000	1,900,000	329.47
- Belanja barang non operasional lainnya	8,153,500	4,411,000	84.84
- Belanja peralatan dan mesin ekstrakontabel	1,500,000		
- Belanja gedung dan bangunan ekstrakontabel	24,350,000		
Belanja barang persediaan	447,612,914	273,063,760	63.92
- Belanja persediaan barang konsumsi	217,381,914	199,165,760	9.15
- Belanja barang persediaan bahan baku	230,231,000	73,898,000	211.55
Belanja Jasa	417,981,845	665,188,487	(37.16)
- Belanja langganan listrik	246,758,888	189,041,695	30.53
- Belanja langganan telepon	13,264,807	16,828,699	(21.18)
- Belanja langganan air	10,562,800	12,983,875	(18.65)
- Belanja langganan daya dan jasa lainnya		79,155,528	(100.00)
- Belanja sewa	43,750,000	8,300,000	427.11
- Belanja jasa profesi	26,800,000	13,800,000	100.00
- Belanja jasa lainnya	76,845,350	337,254,690	(77.21)
- Belanja jasa penanganan pandemi covid-19		7,824,000	(100.00)
Belanja pemeliharaan	744,645,720	439,757,987	69.33
- Belanja pemeliharaan gedung	499,009,150	222,480,000	124.29
- Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	245,636,570	217,277,987	13.05
Belanja perjalanan dalam negeri	903,665,645	603,531,131	49.73
- Belanja perjalanan biasa	618,801,311	547,590,331	13.00
- Belanja perjalanan dinas dalam kota	54,864,000	13,200,000	315.64
- Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota	230,000,334	42,740,800	438.13
Jumlah Belanja	4,104,992,010	3,174,305,218	29.32

Belanja B.5 Belanja Modal

Modal
Rp.602.
686.400.

Penyerapan realisasi belanja modal tahun 2023 adalah sebesar Rp.602.686.400,-. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu maka terdapat penurunan realisasi belanja sebesar Rp.637.395.937,-, mengingat realisasi belanja modal tahun lalu hanya sebesar Rp.1.276.082.337,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	327,443,400	1,221,382,337	(73.19)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	327,443,400	0	#DIV/0!
Belanja Modal Jaringan, Irigasi, Jaringan	26,593,000	98,000,000	(72.86)
Belanja Modal Jaringan	26,593,000		
Penambahan nilai gedung dan bangunan	0	1,123,382,337	(100.00)
Belanja Modal Perlatan dan Mesin	183,950,000	54,700,000	236.29
Belanja Modal Perlatan dan Mesin	183,950,000	54,700,000	236.29
Belanja Modal Tanah	64,700,000	54,700,000	18.28
Belanja Pengurukan dan Pematangan Tanah	64,700,000	54,700,000	18.28
Jumlah Belanja	602,686,400	1,276,082,337	(52.77)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

A. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Komposisi Neraca Balai KIPM Ambon tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)
Aset	19,663,360,179	19,626,996,451	36,363,728
Kewajiban	24,034,345	21,533,520	2,500,825
Ekuitas	19,639,325,834	19,605,462,931	33,862,903

Jumlah Aset Balai KIPM Ambon tahun 2023 sebesar **Rp.19.663.360.179,-**. Apabila dibandingkan dengan jumlah aset tahun lalu maka terdapat kenaikan sebesar Rp.36.363.728,- mengingat posisi aset pada 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp.19.626.996.451**, kenaikan tersebut sebagian besar disebabkan karena adanya penambahan aset pada belanja modal gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin.

Jumlah Aset diatas terdiri dari:

1. Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar **Rp.21.787.960,-**. Apabila aset lancar tersebut dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 maka terdapat penurunan sebesar **Rp.19.498.489,-** (47,23%) mengingat posisi 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp41.286.449,-**.
2. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar **Rp.19.663.360.179,-**. Apabila aset tetap tersebut dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022, maka terdapat penurunan sebesar Rp.36.363.728,- (0,19%) mengingat posisi aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar **Rp.19.626.996.451,-**
3. Jumlah Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar **Rp.0,-**. Tidak terdapat Piutang Jangka Panjang pada Balai KIPM Ambon, baik TA. 2023 maupun TA. 2022.
4. Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar **Rp.0,-**. Tidak terdapat aset lainnya pada Balai KIPM Ambon baik Taun 2023 maupun 2022.
5. Jumlah Kewajiban Per 31 Desember 2023 Balai KIPM Ambon sebesar **Rp.24.034.345,-** yang merupakan kewajiban jangka pendek. Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022, maka terdapat penurunan sebesar Rp.2.500.825,- (11,61%) mengingat posisi kewajiban per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp.21.533.520,-**.
6. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 Balai KIPM Ambon sebesar **Rp.19.639.325.834,-**. Apabila dibandingkan dengan posisi ekuitas per 31 Desember 2022 maka terdapat kenaikan sebesar Rp.33.862.903,- (0,17%) mengingat posisi ekuitas dana per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp. Rp.19.605462.931,-**.

C.2. ASET LANCAR

Nilai Aset Lancar Balai KIPM Ambon per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.21.787.960,-** dan **Rp.41.286.449,-**

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Balai KIPM Ambon Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada Tabel 12

Tabel 12 : Laporan Neraca Balai KIPM Ambon Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Aset Lancar	31 Des 2023	31 Des 2022	Naik/Turun
1	Belanja dibayar dimuka	-	-	-
2	Penyisihan piutang tidak tertagih	-	-	-
3	Piutang bukan pajak	-	-	-
4	Persediaan	21,787,960	41,286,449	(19,498,489)
	Jumlah	21,787,960	41,286,449	(19,498,489)

Kas
Bendahara
Pengeluaran
Rp.0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp.0,- dan Rp.0**

Kas
Bendahara
Penerimaan
Rp.0,-

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,-

Persediaan
Rp.21.787.960

C.1.3. Persediaan

Persediaan merupakan jenis aset yang di bawah nilai kapitalisasi atau barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca dilaporkan tidak lebih dari satu tahun, persediaan tersebut diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Jumlah Persediaan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp.21.787.960- sementara nilai persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 41.286.449,-. Posisi persediaan pada Balai KIPM Ambon dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 13 : Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)
Persediaan	21,787,960	41,286,449	(19,498,489)
Jumlah	21,787,960	41,286,449	(19,498,489)

Tabel 14 : Uraian Persediaan

Akun	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	18,529,530	3,025,430	21,554,960
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	240,000	(7,000)	233,000
117114	Suku Cadang	-	-	-
117121	Pita, Cukai, Materai dan Leges	-	-	-
117131	Bahan Baku	22,516,919	-	-
TOTAL		41,286,449	3,018,430	21,787,960

KEWAJIBAN

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1 Uang Muka dari KPPN

Merupakan kontra pos dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang pada tanggal neraca belum dipertanggungjawabkan secara definitif. Rincian uang muka dari KPPN sebagai berikut:

Tabel 23 : Uang Muka dari KPPN

Per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan
Uang Muka dari KPPN	0	0	0
Jumlah	0	0	0

C.5.2 Utang Pada Pihak Ke Tiga

Utang pada pihak ke tiga merupakan sistem akuntansi secara akrual dimana pencatatan ini di khususkan terkait utang yang belum dibayarkan pada pihak ke tiga pada akhir neraca seperti belanja daya dan jasa. Utang pada pihak ketiga ini sebagian besar merupakan Langganan Daya dan Jasa dan sisanya merupakan kontra pos dari kas lainnya di bendahara pengeluaran yang masih terdapat dalam rekening rekening bendahara pengeluaran dimana pada tanggal neraca belum diberikan kepada pihak ketiga.

Saldo utang pada pihak ketiga Per 31 Desember 2023 sebesar Rp.24.034.345,- yang terdiri dari tagihan listrik bulan Desember sebesar Rp.20.132.955, telepon sebesar Rp.1.104.730,- dan internet sebesar Rp.2.796.660 sementara saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 21.533.520,-. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp.2.500.825 (11,61%). Perbandingan Saldo Utang pada pihak ketiga disajikan pada table berikut ini:

Tabel 24 : Utang Pada Pihak Ke Tiga
Per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)
Utang pada Pihak Ke Tiga	24,034,345	21,533,520	2,500,825
Jumlah	24,034,345	21,533,520	2,500,825

C. EKUITAS

C.1. Ekuitas

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas akan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas Balai KIPM Ambon per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.19.639.325.834,-, sementara ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp.19.605.462.931,-

Tabel 26 : Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)
Ekuitas	19,639,325,834	19,605,462,931	33,862,903
Jumlah	19,639,325,834	19,605,462,931	33,862,903

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan PNBP

Saldo pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.176.795.500,- dan Rp.160.820.639,- Pendapatan PNBP tersebut berasal dari pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan dan Pendapatan Perikanan, Pendapatan penjualan peralatan dan mesin, penerimaan kembali belanja modal tahun yang lalu dan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.

Tabel 26 : Pendapatan PNBP Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)
Pendapatan PNBP	176,795,500	160,820,639	15,974,861
Jumlah	176,795,500	160,820,639	15,974,861

D.2. Beban Pegawai

Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Untuk tahun 2023 beban pegawai Balai KIPM Ambon pada Laporan Operasional sebesar Rp.4.366.179.387,- Sementara beban pegawai untuk periode yang sama TA 2023 sebesar Rp.4.247.963.102,-

Tabel 28: Beban Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)
Beban Pegawai	4,366,179,387	4,247,963,102	118,216,285
Jumlah	4,366,179,387	4,247,963,102	118,216,285

D.3. Beban Persediaan

Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang habis pakai. Beban persediaan tahun 2023 Balai KIPM Ambon sebesar Rp.407.527.539,-. Sementara beban persediaan pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp.249.509.087.

Tabel 29: Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)
Beban Persediaan	407,527,539	249,509,087	158,018,452
Jumlah	407,527,539	249,509,087	158,018,452

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa tahun 2023 Balai KIPM Ambon sebesar Rp.2.011.568.556,-. Sementara beban jasa pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp.1.862.948.963,-

Tabel 30: Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)
Beban Barang dan Jasa	2,011,568,556	1,862,948,963	148,619,593
Jumlah	2,011,568,556	1,862,948,963	148,619,593

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan tahun 2023 Balai KIPM Ambon sebesar Rp.842.482.084,-. Sementara beban pemeliharaan pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp. 447.349.257,-

Tabel 31: Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)
Beban Pemeliharaan	842,482,084	477,349,257	365,132,827
Jumlah	842,482,084	477,349,257	365,132,827

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas tahun 2023 Balai KIPM Ambon sebesar Rp.903.665.645,-. Sementara beban perjalanan dinas pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp.603.531.131,.

Tabel 32: Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)
Beban Perjalanan Dinas	903,665,645	603,531,131	300,134,514
Jumlah	903,665,645	603,531,131	300,134,514

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi semester II tahun 2023 Balai KIPM Ambon sebesar Rp.552.960.456,-. Sementara beban penyusutan dan amortisasi pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp.1.060.243.477.

Tabel 33: Beban penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	522,960,456	1,060,243,477	(537,283,021)
Jumlah	522,960,456	1,060,243,477	(537,283,021)

D.8. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus / defisit dari kegiatan non operasional semester II TA. 2023 Balai KIPM Ambon sebesar Rp.37.860.500,-. Sementara beban penyusutan dan amortisasi pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp.(1.212.068.708),-

Tabel 34: Surplus / defisit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)
Surplus / defisit dari kegiatan non operasional	37,860,500	(1,212,068,708)	1,249,929,208
Jumlah	37,860,500	(1,212,068,708)	1,249,929,208

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.19.605.462.931,- sementara nilai ekuitas awal pada periode 31 Desember 2022 sebesar Rp. 19.418.470.323,-

Tabel 35: Ekuitas awal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)
Ekuitas awal	19,605,462,931	19,418,470,323	186,992,608
Jumlah	19,605,462,931	19,418,470,323	186,992,608

E.2. Surplus (Defisit) LO

Nilai surplus/defisit LO Balai KIPM Ambon per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.(8.877.588.167) dan Rp. (9.572.972.325,-)

Tabel 35: Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)
Surplus/Defisit-LO	(8,877,588,167)	(9,572,972,325)	695,384,158
Jumlah	(8,877,588,167)	(9,572,972,325)	695,384,158

E.3. Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas

Koreksi yang menambah/mengurangi nilai ekuitas Balai KIPM Ambon per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.1.221.436.665,- dan Rp.(1.479.309.957).

E.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Balai KIPM Ambon per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar

Rp.8.248.773 dan Rp. 1.221.382.337.

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.19.639.325.834,- dan Rp.19.605.462.931,-

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan / (Penurunan)
Ekuitas Akhir	19,639,325,834	19,605,462,931	33,862,903
Jumlah	19,639,325,834	19,605,462,931	33,862,903

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. PENGUNGKAPAN KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian setelah tanggal Neraca

F.2. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

F.2.1 TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BALAI KIPM AMBON TAHUN ANGGARAN 2023

Pada Laporan Keuangan Tahun 2023 tidak terdapat temuan Audit oleh BPK-RI.

F.2.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Balai KIPM Ambon tidak terdapat anggaran yang bersumber dana Hibah dan PLN.
- Pada tahun 2023 terdapat ketidaksesuaian Kode Akun Aset sebanyak 2 Transaksi yakni:

No	Kode Barang	Nama Barang	Harga Satuan
1	4040104001	Pengawasan Pembuatan Pagar Balai KIPM Ambon	22.244.400
2	4040104001	Retensi Pembuatan Pagar Balai KIPM Ambon	9.868.100

Disebabkan Karena Kesalahan Operator Komitmen dalam melakukan

penginputan berupa Pembayaran Biaya Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pagar sebesar Rp.22.244.400 dan Termin Retensi sebesar Rp.9.868.100 pada Balai KIPM Ambon, Realisasi akun Belanja Modal Gedung Bangunan (533111) Pada Modul Komitmen diinput menggunakan Pengembangan Langsung Pagar Permanen tidak melalui KDP terlebih dahulu.

Sudah ditindaklanjuti melalui menu perolehan, penyelesaian pengembangan langsung, dimenu penghapusan dicatat sebagai koreksi pencatatan dan di menu perubahan dicatat sebagai perubahan nilai bertambah ke NUP yang sebenarnya pada Modul Aset.

3. Laporan Keuangan Balai KIPM Ambon tahun 2023 berdasarkan hasil rekonsiliasi Sistem Akuntansi Instansi dengan Sistem Akuntansi Umum Kemkeu yang disusun secara berjenjang.



Ambon, 06 Mei 2024
Kepala Balai KIPM Ambon

Muhammad Hatta Arisandi, S.St.Pi.,M.Si
NIP. 198005272003121001